

## **RINGKASAN**

**PROSEDUR PELAKSANAAN KAJI ULANG LAPORAN PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA TIMUR TAHUN 2024.** Intan Roisah Maulidiah NIM D42210129, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Mumtaza (Pembimbing Lapangan), Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak (Dosen Pembimbing)

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan magang ini merupakan sebuah implementasi atas mata kuliah yang pernah ditempuh. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur dan dilaksanakan pada Bidang Penilaian.

Salah satu tugas dari Bidang Penilaian yaitu melakukan pelaksanaan kaji ulang laporan penilaian KPKNL sebagai bentuk evaluasi atau verifikasi terhadap laporan penilaian aset negara yang dilakukan oleh KPKNL. Tugas ini penting untuk memastikan laporan penilaian KPKNL sesuai dengan standar, akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Penilaian BMN disusun oleh PFPP setelah survei lapangan, mengacu pada Kepdirjen 453 Tahun 2020. Laporan ini menjelaskan tujuan penilaian, asumsi, dasar nilai, dan simpulan hasil analisis. Laporan dikaji ulang oleh Kanwil DJKN sesuai PMK 173 Tahun 2020 untuk memastikan kualitasnya. Proses kaji ulang melibatkan evaluasi metodologi, kelengkapan dokumen pendukung, konsistensi analisis, dan akurasi perhitungan. Standar yang digunakan termasuk SPP dengan pendekatan biaya, pasar, atau pendapatan. Format laporan, kelengkapan dokumen

(SK, Surat Tugas, foto, lampiran), serta akurasi simpulan nilai diperiksa secara manual untuk menjamin akuntabilitas, validitas, dan transparansi laporan.